



**PERAN *HOME COUNTRY* DALAM BISNIS PERUSAHAAN MULTINASIONAL:
STRATEGI DIPLOMASI AMERIKA SERIKAT DALAM
PERPANJANGAN KONTRAK CHEVRON DI INDONESIA TAHUN 2011-2013**

Risky Ananda Lubis

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to describe United States foreign policy to extend the contract of Chevron in Siak Block, Riau, Indonesia. Chevron's effort to extend its contract was not receive positive feedback from Indonesia, because the profit sharing system or a Production Sharing Contract (PSC) that Indonesia have had changed. As the home country of Chevron, the used of smart diplomacy in which both of soft and hard diplomacy employed in order to extend the contract. This research uses both primary and secondary data. This research found that the extension of the Chevron's contract in Siak Block, Riau, Indonesia was influenced by smart diplomacy employed by the United State by combining elements of threat and persuasive such as aid and lobbies.

Keywords: *Chevron, Indonesia, Production Sharing Contract (PSC), smart diplomacy, United States*

PENDAHULUAN

Salah satu perusahaan yang menjalankan usaha eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di bidang hulu dengan Indonesia adalah Chevron (BBC, 2006). Chevron merupakan salah satu *multinational corporations* (MNC) Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi yang mengklaim dirinya sebagai produsen energi geotermal terbesar di dunia (BBC, 2006). Dengan nama PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI), Chevron merupakan unit dari perusahaan Chevron Corporation di Amerika Serikat (Chevron Indonesia, 2016). Chevron telah berada dan melakukan ekspedisi minyak di Indonesia sejak tahun 1924 dengan nama Unocal dan Socal (Chevron Indonesia, 2016). Saat ini, perusahaan tersebut memiliki empat anak perusahaan di Riau, Sumatera, empat anak perusahaan di lepas pantai di Kutai Basin, Kalimantan Timur, tiga anak perusahaan di Makassar, dan di lepas pantai kepulauan Natuna (Chevron Indonesia, 2016).

Setelah hampir 80 tahun mengeksplorasi dan mengeksploitasi energi dalam bentuk *black gold* atau minyak bumi di Indonesia, kontrak Chevron di salah satu anak perusahaannya di Indonesia berakhir pada tahun 2013. Salah satu anak perusahaan yang kontraknya berakhir tersebut adalah di **Blok Siak, Riau yang berakhir pada 27 November 2013** (Tempo, 2013). **Sejak bulan September 2009, Chevron berusaha memperpanjang kontraknya yang terletak di Blok Siak, Riau. Chevron mengajukan surat permohonan kepada Badan**

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) terkait keinginannya untuk memperpanjang kontrak di Blok Siak, Riau untuk kali ketiganya (Tempo, 2013).

Adanya perubahan PSC di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, peraturan yang melibatkan kontrak kerja perusahaan mengalami perubahan (Partowidagdo, 2008). Sehingga, Chevron harus melakukan penyesuaian terhadap aturan yang baru tersebut jika ingin memperpanjang kontraknya (The Jakarta Post, 2012). Belum adanya titik temu antara Chevron dan Pemerintah Indonesia terkait kontrak PSC inilah yang menjadi alasan penundaan terhadap permohonan perpanjangan kontrak Chevron (The Jakarta Post, 2012).

Sebagai salah satu MNC yang berasal dari Amerika Serikat, Chevron memberi keuntungan bagi negaranya, di antaranya adalah pajak dari hasil minyak dan gas bumi yang telah di eksploitasi dari Indonesia (Fortune, 2013). Chevron merupakan salah satu dari tiga perusahaan minyak Amerika Serikat yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara tersebut (Forbes, 2012). Chevron bersama dengan Exxon dan Conoco Phillips telah membayarkan pajak melebihi kewajiban bayar pajak mereka yaitu lebih dari 35% dari penghasilan rata-rata perusahaan Amerika Serikat pertahun (Forbes, 2012).

Amerika Serikat adalah negara adidaya dengan pengaruh yang paling kuat di dunia termasuk dalam hal diplomasi dan kaitannya dengan *black gold* (Daily Mail, 2012). Hubungan diplomasi Amerika Serikat dan Indonesia telah berlangsung sejak masa kemerdekaan Indonesia. Walaupun diplomasi tersebut tidak selalu berjalan lancar, namun pengaruh Amerika Serikat di Indonesia masih kuat dirasakan bahkan semakin kuat pada masa pemerintahan Barack Obama (US Embassy, 2012). Diplomasi dalam bentuk baru yang disebut *smart diplomacy* diperkenalkan Amerika Serikat di bawah kekuasaan Barack Obama (CBS News, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Amerika Serikat dalam upayanya untuk memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data-data primer dan sekunder, yang di dapatkan dari hasil wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual *smart power* yang diterapkan dalam kebijakan *smart diplomacy*.

PEMBAHASAN

Smart diplomacy merupakan penerapan kebijakan dari sebuah strategi baru dengan nama *smart power* yang diperkenalkan oleh Nye (2011). Nye (2011: 22-23) mendefinisikan *smart power* sebagai kemampuan negara untuk mengkombinasikan sumber daya yang berasal dari *hard power* dan *soft power* menjadi sebuah kebijakan yang efektif untuk mendapatkan tujuan atau hasil yang diinginkan. Negara yang menggunakan kebijakan *smart power* tetap mempertahankan kekuatan militernya (*hard power*), dimana kekuatan militer tersebut digunakan ketika tindakan-tindakan persuasif dan berkaitan dengan ekonomi (*soft power*) tidak mampu digunakan untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan oleh negara (Nye, 2011).

Nye (2011) menjelaskan bahwa *smart power* adalah sebuah strategi yang baru dan tepat untuk Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk menyediakan keamanan bagi domestik Amerika Serikat dan sekutunya, sekaligus mengakui pentingnya kekuatan ekonomi, multilateralisme, dan nilai-nilai demokrasi (Nye, 2011). Di sisi lain, Nye (2011) menambahkan bahwa pada dasarnya penerapan kebijakan *smart power* ini telah digunakan oleh Amerika Serikat paska Perang Dunia dengan tujuan menjaga keamanan dunia, namun aplikasinya secara luas baru diperkenalkan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama.

Sebagai *home country*, Amerika Serikat melakukan *smart diplomacy* terhadap Indonesia untuk membantu memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau. Tindakan

smart diplomacy tersebut dapat dilihat dari upaya *soft diplomacy* dan *hard diplomacy* yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Upaya *soft diplomacy* Amerika Serikat dibagi menjadi dua yaitu, upaya *soft diplomacy* yang dijalankan pada forum terbuka dan pada forum tertutup. Upaya *soft diplomacy* yang dijalankan pada forum terbuka oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia pada kasus perpanjangan kontrak Chevron yaitu bantuan dan investasi yang diberikan Amerika Serikat di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertemuan dan kunjungan dengan materi pembicaraan seputar bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Upaya *soft diplomacy* yang dijalankan pada forum tertutup oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia pada kasus perpanjangan kontrak Chevron yaitu dengan mengirimkan nota pertimbangan rahasia kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sedangkan upaya *hard diplomacy* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Chevron adalah dengan mengirimkan surat ancaman untuk menurunkan investasi di bidang pertambangan minyak dan gas bumi karena Indonesia dianggap tidak lagi memiliki iklim investasi yang baik di bidang tersebut.

Melalui upaya *soft diplomacy* Amerika Serikat pada forum terbuka berupa bantuan dan investasi, dapat dilihat dari data yang dirilis World Bank *FDI Annual Report*, USAID *Annual Report*, dan USTR per tahun 2010-2013, bahwa tren nilai investasi Amerika Serikat di bidang pertambangan minyak dan gas bumi melalui investasi penanaman modal perusahaan asing Amerika Serikat dan *foreign direct investment* (FDI) jumlahnya terus meningkat. Hanya nilai USAID yang jumlahnya menurun. Nilai investasi penanaman modal perusahaan asing Amerika Serikat di bidang pertambangan minyak dan gas bumi pada tahun 2010 sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat, pada tahun 2011 sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat, pada tahun 2012 sebesar 1,75 juta dolar Amerika Serikat, dan pada tahun 2013 sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat.

Sedangkan nilai FDI yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia di bidang pertambangan minyak dan gas bumi pada tahun 2010 sebesar 2,7 juta dolar Amerika Serikat, tahun 2011 sebesar 3,5 juta dolar Amerika Serikat, tahun 2012 sebesar 4,7 juta dolar Amerika Serikat, dan tahun 2013 sebesar 4,95 juta dolar Amerika Serikat. Hanya bantuan yang diberikan oleh USAID di bidang pertambangan minyak dan gas bumi ke Indonesia saja yang nilainya menurun, yaitu pada tahun 2010 sebesar 5,53 juta dolar Amerika Serikat, tahun 2011 sebesar 7,52 juta dolar Amerika Serikat, tahun 2012 sebesar 3,7 juta dolar Amerika Serikat, dan tahun 2013 sebesar 2,75 juta dolar Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf BKPM, Hafidz (2015), hingga tahun 2014, Amerika Serikat masih aktif menanamkan modal yang cukup besar di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Hal ini dapat diartikan bahwa Amerika Serikat menganggap Indonesia sebagai salah satu negara yang penting dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan hampir 60% jumlah FDI yang terkonsentrasi pada sektor minyak, gas bumi, dan pertambangan lainnya, artinya Amerika Serikat beranggapan sektor tersebut jauh lebih menguntungkan daripada sektor lainnya. Nilai investasi asing di bidang pertambangan minyak dan gas bumi tersebut menunjukkan bahwa penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan asing Amerika Serikat memberi keuntungan yang lebih besar dari nilai investasinya.

Pada setiap kunjungan kenegaraan, Amerika Serikat kerap kali membicarakan masalah pertambangan minyak dan gas bumi. Selain kunjungan kenegaraan, sejak masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat juga menjalin *Comprehensive Partnertship* atau Kemitraan Komprehensif dengan berbagai negara termasuk Indonesia. *Comprehensive Partnertship* ini adalah salah satu bentuk diplomasi Amerika Serikat di segala bidang termasuk bidang pertambangan minyak dan gas bumi, sehingga dinamakan kemitraan komprehensif. Amerika Serikat juga mengundang Indonesia untuk terlibat dalam sejumlah kerja sama di bidang

pertambangan minyak dan gas bumi seperti *Joint Commission Meeting* (JCM), *Energy Policy Dialogue*, dan *Energy Investment Roundtable*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Ekubang II Amuteng, Kementerian Luar Negeri RI, Nugroho (2015), pertemuan-pertemuan yang diadakan Amerika Serikat sebagai bentuk diplomasinya ke Indonesia di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dapat dilihat dari diadakannya *Comprehensive Partnership*, *Joint Commission Meeting* (JCM), *Energy Policy Dialogue*, dan *Energy Investment Roundtable* (EIR). *Joint Commission Meeting* (JCM) yang pertama kali dilakukan pada tanggal 17 September 2010 (*US Department of State*, 2013). JCM merupakan pertemuan tahunan antara Amerika Serikat dan Indonesia di Washington, D.C. JCM merupakan bentuk kerja sama kedua negara di bidang ekonomi dan politik. Pada pertemuan pertama JCM, cetak biru dari *Comprehensive Partnership* disepakati oleh kedua negara. Pertemuan kedua JCM diadakan pada tanggal 23-24 Juli 2011 (*US Department of State*, 2013). Pertemuan ketiga JCM diadakan pada tanggal 20 September 2012 (*US Department of State*, 2013).

Energy Policy Dialogue antara Amerika Serikat dengan Indonesia. *Energy Policy Dialogue* merupakan pertemuan dua tahunan yang membicarakan tentang aturan-aturan dalam segala hal di bidang energi termasuk aturan kontrak. Pertemuan *Energy Policy Dialogue* ini hanya terbatas pada petinggi kedua negara dan merupakan pertemuan yang dibentuk dari landasan *Comprehensive Partnership*. Berdasarkan data yang diterima oleh peneliti dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Energy Policy Dialogue* pertama diadakan pada tanggal 28-30 Juni 2010 dan *Energy Policy Dialogue* kedua diadakan pada tanggal 4 Juli 2012. Bentuk pertemuan tahunan antara Amerika Serikat dan Indonesia lainnya adalah *Energy Investment Roundtable* (EIR). EIR pertama diadakan pada tanggal 9-10 Mei 2011 (ESDM, 2011). EIR kedua diadakan pada tanggal 6-7 Februari 2012. EIR ketiga diadakan pada tanggal 25-26 November 2013. EIR merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para pihak yang terkait dengan energi.

Upaya *soft diplomacy* Amerika Serikat pada forum tertutup berupa pertemuan atau kunjungan, serta mengirimkan nota pertimbangan rahasia ke Indonesia sebagai bentuk diplomasi tertutup untuk membantu Chevron memperpanjang kontrak di Blok Siak, Riau. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Special Staff of Department of State US Embassy*, Litke (2015) yang menyatakan bahwa ruang lingkup diplomasi Amerika Serikat di bidang pertambangan minyak dan gas bumi terhadap Indonesia juga termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, termasuk waktu perpanjangan kontrak. Pernyataan Litke (2015) menunjukkan keterlibatan *power* dan diplomasi Amerika Serikat pada kontrak-kontrak perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Pertama, pada tanggal 28-30 Juni 2010, dimana merupakan pertemuan ketiga antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam forum *Energy Policy Dialogue* di Washington, D.C. *Kedua*, pada tanggal 24 Juli 2011, dimana Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengirimkan nota pertimbangan rahasia kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak Chevron di Blok Siak, Riau. *Soft diplomacy* Amerika Serikat dalam forum tertutup ini berdampak positif. Pada September 2011, dua bulan setelah Amerika Serikat mengirimkan nota pertimbangan rahasia, Pemerintah Indonesia menerima Proposal Lengkap Perpanjangan Kontrak Chevron di Blok Siak, Riau (Detik Finance, 2013). *Ketiga*, pada tanggal 16 Mei 2012 Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia kembali mengirimkan nota pertimbangan rahasia kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menindaklanjuti pembahasan teknis lebih lanjut dalam memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau, yang sebelumnya telah dilakukan pada November 2011. *Keempat*, pada tanggal 8-9 April 2013, *United States Department of Energy* bersama dengan pihak Chevron mengadakan pertemuan dengan

Kementerian ESDM dan Kementerian Luar Negeri untuk membahas tentang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau, yang berakhir pada 27 November 2013.

Sementara itu, upaya *Hard Diplomacy* Amerika Serikat untuk memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau, Indonesia berupa pengiriman surat ancaman penurunan investasi di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Pada tanggal 30 November 2012, Chevron mengirimkan delapan surat kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) (Tempo, 2013). Surat tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang atas kontrak Chevron di Indonesia, dimana sebanyak satu surat ditandatangani oleh Hamid Batubara dan tujuh surat lainnya ditandatangani oleh Jeff E. Shellebarger (Tempo, 2013). Delapan surat dari Chevron tersebut berisi hal yang sama, yaitu ancaman penurunan investasi Chevron di Indonesia karena adanya perubahan ketentuan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 tentang *cost recovery* dan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tempo, 2013). Delapan surat dari Chevron tersebut mewakili seluruh operasi Chevron di Indonesia, yaitu Blok Rokan, Siak, Rapak, Ganai, Kalimantan Timur, Selat Makasar, Papua Barat I, dan Papua Barat II.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Direktur Chevron Pacific Indonesia, Abdul Hamid Batubara, mengatakan bahwa rencana penurunan nilai investasi Chevron di Indonesia dikarenakan pemerintah merevisi sejumlah peraturan tentang minyak dan gas bumi yang tidak menguntungkan perusahaan (Tempo, 2013). Di dalam surat bernomor 4103/JKT/2012 perihal Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program and Budget/WP&B) 2013 tersebut, Hamid atas nama Chevron menyatakan dengan tegas, "*Kami mempunyai hak untuk menurunkan investasi yang mengakibatkan penurunan produksi apabila terjadi perubahan yang besar terhadap iklim investasi di Indonesia*", (Tempo, 2013). Ancaman terhadap Indonesia tersebut tidak hanya datang dari Chevron, namun juga dari pihak Amerika Serikat.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM pada November 2012 (Tempo, 2012). Surat Scot Marciel tersebut berisi kekecewaannya atas nama Amerika Serikat atas perubahan iklim pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia yang tidak kondusif lagi dan tidak menguntungkan bagi perusahaan minyak dan gas buminya, terutama Chevron (Tempo, 2012). Dilansir oleh Tempo (2012), surat yang ditandatangani oleh Scot Marciel dan dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia tersebut juga berisi pernyataan bahwa Amerika Serikat akan menurunkan jumlah investasinya di bidang pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Surat yang ditandatangani oleh Scot Marciel berisi sama dengan surat yang dikirimkan oleh Chevron (Tempo, 2012). Amerika Serikat dan Chevron menyatakan akan menurunkan sejumlah investasinya di bidang pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dikarenakan adanya perubahan iklim pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Berdasarkan konsep yang dijabarkan di dalam *hard diplomacy*, surat Amerika Serikat dan Chevron tersebut termasuk di dalam kategori ancaman dari segi ekonomi.

PENUTUP

Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber terkait, penjabaran, dan analisis dengan menggunakan konsep strategi power, yang diterapkan menjadi tindakan diplomasi, maka peneliti menyimpulkan bahwa Amerika Serikat menerapkan *smart diplomacy* untuk memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau, Indonesia. Hasil analisis pada penelitian ini adalah *smart diplomacy* Amerika Serikat berpengaruh untuk memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau, Indonesia. Tindakan diplomasi Amerika Serikat berpengaruh karena tujuan untuk memperpanjang kontrak di Blok Siak, Riau, Indonesia, telah terpenuhi dengan terjadinya perpanjangan kontrak selama satu tahun sesuai dengan diplomasi yang dilakukan oleh pihak Chevron dan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Amerika Serikat telah menerapkan strategi *smart*

diplomacy dalam upayanya untuk memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau, Indonesia. Amerika Serikat menggunakan upaya-upaya yang bersifat persuasif dan juga ancaman untuk memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau, Indonesia. Strategi *smart diplomacy* Amerika Serikat terhadap Indonesia tersebut berpengaruh dengan diperpanjangnya kontrak Chevron di Blok Siak, Riau.

Sebagai hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa alasan yang menjadi bukti berpengaruhnya penerapan *smart diplomacy* Amerika Serikat untuk memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau. *Alasan pertama*, Amerika Serikat terbukti melakukan diplomasi pada forum terbuka dan tertutup yang berpengaruh terhadap perpanjangan kontrak Chevron di Blok Siak, Riau. *Alasan kedua*, adanya surat keputusan pemerintah Indonesia bertanggal 27 Oktober 2013. Keputusan tersebut didasari oleh rekomendasi Kepala SKK Migas melalui surat bernomor 0013/SKO0000/2013/S1 pada tanggal 10 Januari 2013 tentang pengelolaan Wilayah Kerja Siak pasca 2013 dan surat Direktur Utama PT. Pertamina nomor R-37/C00000/2013-SO pada tanggal 25 Februari 2013 tentang pengelolaan Blok Siak, Riau, Sumatera Tengah. *Alasan ketiga*, terpenuhinya tujuan Amerika Serikat dan Chevron untuk memperpanjang kontrak di Blok Siak, Riau, selama satu tahun hingga tahun 2014. Setelah kontrak benar-benar habis, Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang kontrak Chevron selama satu tahun, dengan enam bulan masa tenggang.

Referensi

- BBC. (2006). “*Chevron Claims Energy Debate*”. <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4716334.stm>>. diakses 31 Maret 2016.
- CBS News. (2009). “*Clinton: Use "Smart Power" In Diplomacy*”. <<http://www.cbsnews.com/news/clinton-use-smart-power-in-diplomacy/>>. diakses 30 Maret 2016.
- Chevron. (2014). “*How Energy Can Supercharge the U.S. Economy*”. <http://www.chevron.com/news/inthenews/article/02052013_energyconomy.news>. diakses pada 17 januari 2016.
- Chevron. (2016). “*Company History*”. <<http://www.chevron.com/about/history/>>. diakses pada 19 Januari 2016.
- Daily Mail. (2012). “*Beware the Oily Diplomacy of U.S. Politicians*”. <<http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2101217/Beware-oily-diplomacy-U-S-politicians.html>>. diakses pada 10 November 2015.
- Detik News. (2009). Putus Kebijakan Bush, Obama Jalin Kemitraan Komprehensif dengan RI. <<http://news.detik.com/read/2009/02/18/232422/1087084/10/putus-kebijakan-bush-obama-jalin-kemitraan-komprehensif-dengan-ri?nd771104bcj>>. diakses 30 Maret 2016.
- Detik Finance. (2013). Tanggapi 'Ancaman' Chevron, Jero Wacik: Itu Sudah Usang! <<http://finance.detik.com/read/2013/01/10/150447/2138540/1034/tanggapi-ancaman-chevron-jero-wacik-itu-sudah-usang>>. diakses pada 7 April 2016.
- Fortune. (2013). “*20 Companies That Made the Most*”. <<http://fortune.com/2013/05/06/20-companies-that-made-the-most/>>. diakses pada 11 November 2015.
- Forbes. (2012). “*Which Companies Pay The Most In Taxes?*”. <<http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2012/04/16/which-megacorps-pay-megataxes/>>. diakses pada 11 November 2015.
- Kementerian ESDM. (2011). Pekan Depan, Indonesia-US Energy Investment Roundtable. <<http://esdm.go.id/berita/40-migas/4473-pekan-depan-indonesia-us-energy-investment-roundtable.html>>. diakses pada 17 November 2015.
- Montague, Gilbert Holland. (2003). *The Rise and Progress of the Standard Oil Company*. Ontario: Batoche Books Kitchener.
- Nye, Joseph. (2011). *The Future Of Power*. New York: Public Affairs.

- Parra, Francisco. (2012). *Oil Politics, A Modern History of Petroleum*. New York : I. B. Tauris.
- Partowidagdo, Widjajono. (2008). *PSC di Indonesia versus Pengusahaan Migas Dunia Cost Recovery versus Peningkatan Produksi Migas di Indonesia*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Jakarta, 31 Juli 2008.
- Partowidagdo, Widjajono. (2008). *Pengantar Produksi Investasi dan Kemampuan Nasional Hukum Migas*. Jakarta : CIDES.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Tempo. (2013). Pemerintah Serahkan Blok Siak ke Pertamina. <<https://bisnis.tempo.co/read/news/2013/11/28/090533151/pemerintah-serahkan-blok-siak-ke-pertamina>>. diakses 13 April 2016.
- The Jakarta Post. (2012). “Rule on Oil, Gas Contract Extensions Expected”. <<http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/03/rule-oil-gas-contract-extensions-expected.html>>. diakses pada 3 November 2015.
- US Department of State. (2009). “Fact Sheet of American "Smart Power": Diplomacy and Development Are the Vanguard”. <<http://www.state.gov/r/pa/scp/fs/2009/122579.htm>>. diakses pada 11 Oktober 2015.
- US Department of State. (2013). “United States-Indonesia Comprehensive Partnership”. <<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/10/215196.htm>>. diakses pada 11 Oktober 2015.